

ABSTRAK

Pelaksanaan reklamasi pasca tambang diwajibkan bagi setiap orang yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini diatur dalam pasal 161B Undang – Undang Mineral dan Batu Bara. Namun kenyataan yang terjadi di daerah Bojonegoro masih saja ada oknum yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang dikarenakan dengan alasan kegiatan tersebut memerlukan biaya yang mahal. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa penegakan hukum tidak dilakukan terhadap oknum yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Metode yang digunakan ini adalah yuridis sosiologis. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa aparat penegak hukum tidak melakukan penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang yang berada di Bojonegoro, Dengan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh aparat hukum mengenai peraturan perundang – undangan tersebut harus ditegakkan kepada masyarakat atau oknum terkait agar masyarakat dan oknum yang terkait dapat memahami aturan yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : Reklamasi, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Post-mining reclamation is a legal requirement for IUPK holders as per Article 161B of the Mineral and Coal Law. However, in Bojonegoro, non-compliance is prevalent due to the financial burdens associated with the process. This sociological juridical study exposes a lack of law enforcement against individuals who disregard their post-mining reclamation responsibilities. Although the community and stakeholders demonstrate a solid understanding of mining regulations, enforcement challenges persist. Further investigation is necessary to identify and address the factors impeding the successful implementation of post-mining reclamation practices in the region.

In summary, the legal obligation outlined in Article 161B is not effectively enforced in Bojonegoro, resulting in non-compliance with post-mining reclamation requirements. The study highlights the need for improved enforcement mechanisms and a comprehensive examination of the barriers hindering the proper execution of reclamation activities.

Keywords: Reclamation, Law Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Kegunaan	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	8
1.5 Lokasi.....	8
1.6 Keaslian	9
1.7 Metode Penelitian	10
1.7.1 Jenis Penelitian	10
1.7.2 Metode Pendekatan	11
1.7.3 Data Penelitian dan Sumber Data.....	11
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data	13
BAB II.....	15
TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN MENINGGALKAN BEKAS LUBANG GALIAN TAMBANG MINYAK	15
2.1 Penegakan Hukum	15

2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	15
2.1.2 Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan	18
2.1.3 Tujuan Penegakan Hukum.....	19
2.1.4 Faktor Penghambat Penegakan Hukum	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Meninggalkan Galian Lubang Tambang Minyak.....	24
2.2.1 Tinjauan Tindak Pidana	24
2.2.2 Pengertian Bekas, Lubang Galian, Tambang Minyak.....	27
2.3 Undang – Undang Yang Berkaitan Dengan Bekas Lubang Galian Tambang Minyak.....	27
BAB III	32
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BEKAS LUBANG GALIAN TAMBANG MINYAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN	32
3.1 Gambaran Umum Kegiatan Pertambangan di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro	32
3.2 Penegakan Hukum Terhadap Bekas Lubang Galian Tambang Minyak Dalam Perspektif Hukum Pidana Lingkungan.....	34
3.3 Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Bekas Lubang Galian Tambang Minyak	37
3.3.1 Faktor Undang – Undang	39
3.3.2 Faktor Penegak Hukum	40
3.3.3 Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.....	42
3.3.4 Faktor Masyarakat.....	44
3.3.5 Faktor Kebudayaan.....	47
4.1 Kesimpulan	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54
BIODATA PENULIS	56

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BEKAS LUBANG GALIAN TAMBANG
MINYAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN.